

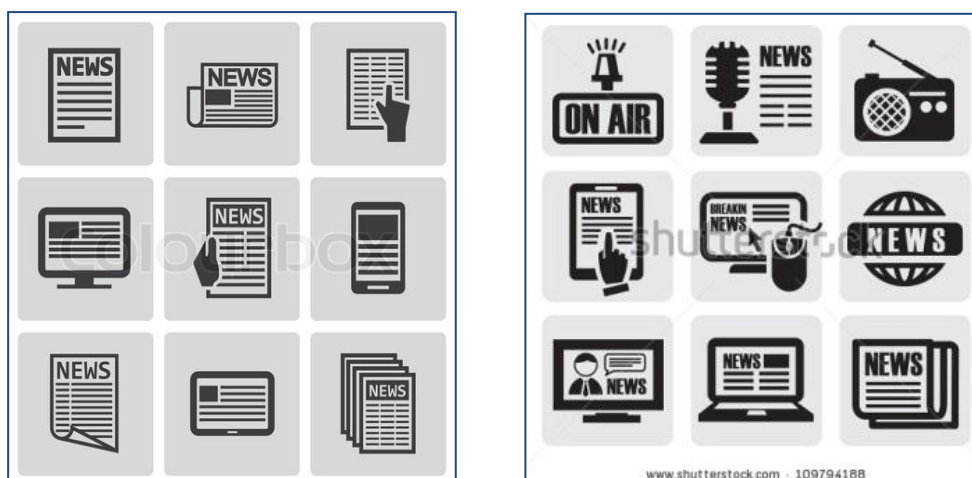


**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Newspaper Media Online**

Politik

Rabu, 13 Januari 2016



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan  
Jakarta, Bappenas  
2016**

## **Daftar Isi**

1. GBHN JANGAN JADI BOLA LIAR (*Media Online Kompas*)
2. IDE REAKTIVITASI GBHN DIDUKUNG (*Media Online Media Indonesia*)

# GBHN Jangan Jadi Bola Liar

DPD Usulkan Amandemen UUD 1945 secara Menyeluruh

JAKARTA, KOMPAS – Indonesia membutuhkan haluan negara untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Namun, wacana yang digulirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memunculkan gagasan tentang Garis Besar Haluan Negara tersebut jangan sampai menjadi bola liar.

Pasalnya, amandemen UUD 1945 yang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P diwacanakan hanya akan dilakukan untuk memberi kewenangan kepada MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN dapat melebar ke ketentuan lain dalam konstitusi.

(Sambungan dari halaman 1)

bergerak ke rencana mengubah UUD 1945," katanya.

Ketua Dewan Pembina Nasional Strategic Center Letnan Jenderal (Purn) Syaiful Rizal mengatakan, wacana amandemen konstitusi sebaiknya dihentikan.

"Sudah cukup proses amandemen yang dilakukan selama ini. Ibarat baju yang terus diubah-ubah demi kemauan sesaat pemerintahan, hasilnya akan semakin amburadul. Kini, yang ditunggu rakyat adalah pembangunan riil. Bicara GBHN saja, banyak orang masih trauma dengan produk Orde Baru," tuturnya.

Namun, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera M Sohibul Iman menyambut baik gagasan PDI-P untuk menghidupkan kembali GBHN. Mereka berjanji akan membicarakannya dengan pimpinan partai politik anggota Koalisi Merah Putih lainnya.

Ketua Kelompok DPD di MPR John Pieris menambahkan, gagasan pemberlakuan kembali GBHN sejalan dengan keinginan DPD. Menurut dia, empat tahun lalu, Kelompok DPD di MPR sudah mengusulkan agar GBHN dihidupkan kembali. Pemberla-

nya, amandemen UUD 1945 yang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P diwacanakan hanya akan dilakukan untuk memberi kewenangan kepada MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN dapat melebar ke ketentuan lain dalam konstitusi.

Harapan bahwa amandemen UUD 1945 tak hanya dilakukan terkait kewenangan MPR menyusun dan menetapkan GBHN

terkait hal ini, saat menutup

Perundang-undangan (*Kompas*, 12/1).

**Makan bersama**

Seusai penutupan Rakernas I PDI-P, semalam, Presiden Joko Widodo menjamu pengurus PDI-P se-Indonesia di Istana Negara. Pertemuan berlangsung santai mulai pukul 18.30 hingga pukul 20.30. Hadir pada pertemuan itu Megawati Soekarnoputri dan 34 pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) PDI-P.

"Kami diundang Bapak Presiden pada saat rapat kerja nasional kemarin. Kami bertemu membicarakan masalah-masalah ringan. Tidak ada pembicaraan serius di sana. Kami lebih banyak bernostalgia partai," kata TB Hasanuddin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Barat.

Dalam pertemuan itu, kata Hasanuddin, Presiden merespons positif perlunya pembangunan nasional semesta berencana. Selanjutnya, katanya, menjadi tugas pengurus partai untuk menyuarakan hal itu kepada masyarakat luas. Presiden mengajak semua elemen PDI-P bekerja untuk kepentingan rakyat dari Sabang sampai Merauke.

Sementara itu, Megawati menyampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah menerima pengurus PDI-P. Selebihnya, Me-

gawati larut dalam suasana santai. Menurut Hasanuddin, pertemuan itu semakin mendekatkan hubungan antara Presiden yang pernah menjadi pengurus PDI-P dan fungsionaris PDI-P saat ini.

Ia menambahkan, selain Megawati dan 34 pengurus DPD PDI-P se-Indonesia, hadir pula dalam pertemuan itu Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto serta Puan Maharani, putri Megawati yang juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Peserta pertemuan, ujarnya, menikmati hidangan yang disajikan pihak Istana berupa soto, ayam goreng, tahu, telur dadar, cendol, dendeng, nasi hijau, dan beragam masakan lain.

Megawati meninggalkan Istana Negara lewat halaman samping barat gedung. Ia masuk ke sedan hitam bermomor polisi B 1200 BS. Di mobil yang sama, masuk di ruang kabin belakang Puan Maharani. Sementara Hasto masuk ke kabin depan mobil yang sama.

(SAN/RYO/OSA/NTA/AGE/NDY)

Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca Kompas Siang di kompasprint.com

Perundangan (Kompas, 12/1).

**Makan bersama**

Seusai penutupan Rakernas I PDI-P, semalam, Presiden Joko Widodo menjamu pengurus PDI-P se-Indonesia di Istana Negara. Pertemuan berlangsung santai mulai pukul 18.30 hingga pukul 20.30. Hadir pada pertemuan itu Megawati Soekarnoputri dan 34 pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) PDI-P.

"Kami diundang Bapak Presiden pada saat rapat kerja nasional kemarin. Kami bertemu membicarakan masalah-masalah ringan. Tidak ada pembicaraan serius di sana. Kami lebih banyak bernostalgia partai," kata TB Hasanuddin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Barat.

Dalam pertemuan itu, kata Hasanuddin, Presiden merespons positif perlunya pembangunan nasional semesta berencana. Selanjutnya, katanya, menjadi tugas pengurus partai untuk menyuarakan hal itu kepada masyarakat luas. Presiden mengajak semua elemen PDI-P bekerja untuk kepentingan rakyat dari Sabang sampai Merauke.

Sementara itu, Megawati menyampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah menerima pengurus PDI-P. Selebihnya, Me-

gawati larut dalam suasana santai. Menurut Hasanuddin, pertemuan itu semakin mendekatkan hubungan antara Presiden yang pernah menjadi pengurus PDI-P dan fungsionaris PDI-P saat ini.

Ia menambahkan, selain Megawati dan 34 pengurus DPD PDI-P se-Indonesia, hadir pula dalam pertemuan itu Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto serta Puan Maharani, putri Megawati yang juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Peserta pertemuan, ujarnya, menikmati hidangan yang disajikan pihak Istana berupa soto, ayam goreng, tahu, telur dadar, cendol, dendeng, nasi hijau, dan beragam masakan lain.

Megawati meninggalkan Istana Negara lewat halaman samping barat gedung. Ia masuk ke sedan hitam bermomor polisi B 1200 BS. Di mobil yang sama, masuk di ruang kabin belakang Puan Maharani. Sementara Hasto masuk ke kabin depan mobil yang sama.

(SAN/RYO/OSA/NTA/AGE/NDY)

Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca Kompas Siang di kompasprint.com

Perundangan (Kompas, 12/1).

**Makan bersama**

Seusai penutupan Rakernas I PDI-P, semalam, Presiden Joko Widodo menjamu pengurus PDI-P se-Indonesia di Istana Negara. Pertemuan berlangsung santai mulai pukul 18.30 hingga pukul 20.30. Hadir pada pertemuan itu Megawati Soekarnoputri dan 34 pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) PDI-P.

"Kami diundang Bapak Presiden pada saat rapat kerja nasional kemarin. Kami bertemu membicarakan masalah-masalah ringan. Tidak ada pembicaraan serius di sana. Kami lebih banyak bernostalgia partai," kata TB Hasanuddin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Barat.

Dalam pertemuan itu, kata Hasanuddin, Presiden merespons positif perlunya pembangunan nasional semesta berencana. Selanjutnya, katanya, menjadi tugas pengurus partai untuk menyuarakan hal itu kepada masyarakat luas. Presiden mengajak semua elemen PDI-P bekerja untuk kepentingan rakyat dari Sabang sampai Merauke.

Sementara itu, Megawati menyampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah menerima pengurus PDI-P. Selebihnya, Me-

gawati larut dalam suasana santai. Menurut Hasanuddin, pertemuan itu semakin mendekatkan hubungan antara Presiden yang pernah menjadi pengurus PDI-P dan fungsionaris PDI-P saat ini.

**Hentikan wacana**

Namun, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra mengingatkan, di atas kertas bisa saja PDI-P menyebut amandemen secara terbatas. Namun, amandemen itu tetap berpotensi bergerak ke mana-mana jika dilakukan karena gerakan lembaga politik sering kali sulit diprediksi. "Oleh sebab itu, sebaiknya jangan du-

(Sambungan ke hal 15 kol 1-4)

Perundangan (Kompas, 12/1).

**Makan bersama**

Seusai penutupan Rakernas I PDI-P, semalam, Presiden Joko Widodo menjamu pengurus PDI-P se-Indonesia di Istana Negara. Pertemuan berlangsung santai mulai pukul 18.30 hingga pukul 20.30. Hadir pada pertemuan itu Megawati Soekarnoputri dan 34 pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) PDI-P.

"Kami diundang Bapak Presiden pada saat rapat kerja nasional kemarin. Kami bertemu membicarakan masalah-masalah ringan. Tidak ada pembicaraan serius di sana. Kami lebih banyak bernostalgia partai," kata TB Hasanuddin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Barat.

Dalam pertemuan itu, kata Hasanuddin, Presiden merespons positif perlunya pembangunan nasional semesta berencana. Selanjutnya, katanya, menjadi tugas pengurus partai untuk menyuarakan hal itu kepada masyarakat luas. Presiden mengajak semua elemen PDI-P bekerja untuk kepentingan rakyat dari Sabang sampai Merauke.

Sementara itu, Megawati menyampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah menerima pengurus PDI-P. Selebihnya, Me-

gawati larut dalam suasana santai. Menurut Hasanuddin, pertemuan itu semakin mendekatkan hubungan antara Presiden yang pernah menjadi pengurus PDI-P dan fungsionaris PDI-P saat ini.

Ia menambahkan, selain Megawati dan 34 pengurus DPD PDI-P se-Indonesia, hadir pula dalam pertemuan itu Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto serta Puan Maharani, putri Megawati yang juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Peserta pertemuan, ujarnya, menikmati hidangan yang disajikan pihak Istana berupa soto, ayam goreng, tahu, telur dadar, cendol, dendeng, nasi hijau, dan beragam masakan lain.

Megawati meninggalkan Istana Negara lewat halaman samping barat gedung. Ia masuk ke sedan hitam bermomor polisi B 1200 BS. Di mobil yang sama, masuk di ruang kabin belakang Puan Maharani. Sementara Hasto masuk ke kabin depan mobil yang sama.

(SAN/RYO/OSA/NTA/AGE/NDY)

Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca Kompas Siang di kompasprint.com

Perundangan (Kompas, 12/1).

**Makan bersama**

Seusai penutupan Rakernas I PDI-P, semalam, Presiden Joko Widodo menjamu pengurus PDI-P se-Indonesia di Istana Negara. Pertemuan berlangsung santai mulai pukul 18.30 hingga pukul 20.30. Hadir pada pertemuan itu Megawati Soekarnoputri dan 34 pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) PDI-P.

"Kami diundang Bapak Presiden pada saat rapat kerja nasional kemarin. Kami bertemu membicarakan masalah-masalah ringan. Tidak ada pembicaraan serius di sana. Kami lebih banyak bernostalgia partai," kata TB Hasanuddin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Barat.

Dalam pertemuan itu, kata Hasanuddin, Presiden merespons positif perlunya pembangunan nasional semesta berencana. Selanjutnya, katanya, menjadi tugas pengurus partai untuk menyuarakan hal itu kepada masyarakat luas. Presiden mengajak semua elemen PDI-P bekerja untuk kepentingan rakyat dari Sabang sampai Merauke.

**Indonesia membutuhkan haluan negara untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Jika terjadi dalam kondisi politik saat ini, hal itu berpotensi menguras energi dan membawa ketidakpastian kehidupan berbangsa. Harapan bahwa amandemen UUD 1945 tak hanya dilakukan terkait kewenangan MPR menyusun dan menetapkan GBHN sudah disampaikan sejumlah anggota DPD, maka amandemen konstitusi dilakukan untuk menata sistem ketatanegaraan secara keseluruhan**

Hashtag berita :

#Konstitusional #DasarNegara #GarisBesarHaluanNegara #SistemPolitikIndonesia #RPJMN #RencanaKerjaPemerintah #PolitikDalamNegeri #LembagaNegara

Rabu, 13 Januari 2016

# Ide Reaktivasi GBHN Didukung

Megawati meminta ada ruang untuk mendiskusikan isu pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi.

**ASTRI NOVARIA**

**G**AGASAN Presiden ke-5 Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Rapat Kerja Nasional 1 PDIP di Jakarta mendapatkan dukungan.

Salah satunya dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan pihaknya mendukung ide pengaktifan kembali GBHN karena sejalan dengan Rekomendasi MPR 2009-2014.

"Hal itu dalam satu paket dengan rekomendasi tentang perlunya penyempurnaan sistem ketatanegaraan melalui Amendemen Kelima UUD 1945, yang di dalamnya menekankan pentingnya penguatan DPD," ujar Farouk di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan sama, Ketua Badan Pengembangan Kerja Sama Kelembagaan DPD Bam bang Sadono menambakan, pengaktifan kembali GBHN diperlukan untuk mengakomodasi suara seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau (rencana pembangunan jangka menengah) itu berdasarkan visi-misi presiden terpilih, berarti ada suara yang tidak terakomodasi. Itu alasan kenapa GBHN perlu dihidupkan kembali," jelasnya.

Selain itu, kata Bambang, Indonesia membutuhkan rencana jangka panjang yang akan dijalankan oleh setiap pemimpin bangsa. "Jangan sampai pemimpin-pemimpin per periode itu

*nggak nyambung (visi-misinya)."*

Wacana pengaktifan kembali GBHN juga disambut baik oleh mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen (Purn) Syaiful Rizal. Menurut Syaiful, GBHN sangat diperlukan agar Indonesia berjalan sesuai arah yang ditentukan. GBHN, tambah dia, juga diperlukan agar kemajuan bangsa tidak diisi oleh *deal-deal* politik untuk sebuah kekuasaan.

**Amendemen**

Penghidupan kembali GBHN itu menjadi salah satu butir rekomendasi (lihat grafik) yang dihasilkan dalam Rakernas 1 PDIP, yang ditutup secara resmi oleh Megawati, kemarin. Pada kesempatan itu, Megawati berharap semua pihak dapat memahami pola pembangunan nasional semesta berencana (PNSE) sebagai haluan pembangunan nasional.

"Arti nasional adalah pola itu harus menggambarkan seluruh daerah dan seluruh lapisan golongan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ujar Megawati. Penyebaran proyek pembangunan, kata dia, harus menjamin sifat nasional di seluruh Indonesia.

Megawati menambahkan, rekomendasi rakernas lainnya ialah meminta dirinya sebagai Ketua Umum DPP PDIP menginstruksikan kader partai yang ditugaskan di DPR RI untuk memperjuangkan amendemen UUD 1945 terbatas. Ia berharap amendemen dilakukan pada pasal-pasal yang hendak diubah saja, yakni terkait dengan kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara dalam pembangunan nasional.

"Kalau (MPR) tertinggi itu kan seperti kalau saya di sini bisa melihat semua... Mengembalikannya kepada posisi tertinggi. Nah, itu rebus. Buka ruang dulu, didiskusikan, jangan reaktif langsung mau *nutup*. Ini kan tawaran dari PDIP. Saya maunya, *mbo* ya direbus saja dulu. Lihat, evaluasi, seperti apa kita dewasa ini di tengah negara lain yang keinginan majunya luar biasa," pungkasnya. (Nur/Nyu/X-7)

## Beberapa Rekomendasi Rakernas PDIP

- Memastikan, mengarahkan, dan mengamankan kebijakan politik pemerintah tetap satu arah, satu haluan dengan nilai-nilai Pancasila.
- Mewujudkan konsepsi Trisakti dalam suatu pola pembangunan nasional semesta berencana sebagai haluan negara dan haluan pembangunan nasional.
- Meningkatkan peran PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah.
- Mengembalikan fungsi dan wewenang MPR RI.
- Menguatkan kelembagaan perencanaan nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mendukung pelaksanaan program revolusi mental.
- Mendukung upaya pemerintahan mewujudkan tujuan negara dan melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Memastikan daulat rakyat atas kekayaan alam Indonesia dengan meninjau kembali kontrak-kontrak karya yang ada.
- Konstitusi mengamankan BUMN sebagai salah satu saka guru perekonomian nasional untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.
- Mendorong pemerintah meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan dengan pendekatan kesejahteraan.
- Sengketa lahan dapat diselesaikan dengan prinsip keadilan.

Sumber: Rakernas PDIP/1-1 Grafik: CAKSONO

[astri@mediaindonesia.com](mailto:astri@mediaindonesia.com)

**Gagasan Presiden ke-5 Indonesia memberi dukungan untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Salah satunya dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Wakil Ketua DPD mengatakan pihaknya mendukung ide pengaktifan kembali GBHN karena sejalan dengan Rekomendasi MPR 2009-2014. "Hal itu dalam satu paket dengan rekomendasi tentang perlunya penyempurnaan sistem ketatanegaraan melalui Amendemen Kelima UUD 1945, yang di dalamnya menekankan pentingnya penguatan DPD**

Hashtag Berita :

#PolitikDalamNegeri

GarisBesarHaluanNegara

#Konstitusional

#DasarNegara

#SistemPolitikIndonesia #LembagaNegara #RPJMN